

**PENGARUH PENUGASAN BERULANG, KECAKAPAN
PROFESIONAL AUDITOR DAN UKURAN PEMERINTAH
TERHADAP *AUDIT DELAY* LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :
ALVIAN DIAN PRADITYA
B 200 130099**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENUGASAN BERULANG,
KECAKAPAN PROFESIONAL AUDITOR DAN UKURAN
PEMERINTAH TERHADAP *AUDIT DELAY*
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang di Tulis Oleh:

ALVIAN DIAN PRADITYA

B 200 130099

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Erma Setiawati, Dr, Dra, Ak., MM)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENUGASAN BERULANG,
KECAKAPAN PROFESIONAL AUDITOR DAN UKURAN
PEMERINTAH TERHADAP *AUDIT DELAY*
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah)**

Oleh:

ALVIAN DIAN PRADITYA
B 200 130099

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa 12 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Erma Setiawati, Dr, Dra, Ak., MM.

(.....)


(Ketua Dewan Penguji)

2. Eny Kusumawati, S.E., Akt., M.M

(.....)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D.

(.....)

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM.
NIDN.0017025701

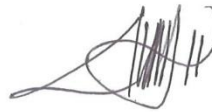
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2019

Penulis



ALVIAN DIAN PRADITYA
B200130099

**PENGARUH PENUGASAN BERULANG, KECAKAPAN PROFESIONAL
AUDITOR DAN UKURAN PEMERINTAH *AUDIT DELAY* LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah)**

Abstrak

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan laporan keuangan tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Audit Delay adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Studi ini menganalisa pengaruh dari karakteristik auditor terhadap *audit delay* yang terjadi di pemerintah daerah di Jawa Tengah. Studi ini menggunakan 54 pemerintah daerah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semarang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, penugasan berulang dan kecakapan profesional tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Kata Kunci: *audit delay*, karakteristik auditor, penugasan berulang dan kecakapan profesional

Abstract

Overdue financial statements reporting may cause loses in its capacity to influence decisions. Audit delay is one of the factors that affects the timeliness of financial statements. This study examines the effects of auditor characteristics on local goverment's audit delay in Center Java. This study uses 54 local governments as a selected sample with purposive sampling method. The research data is secondary data obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-SEMARANG). Thedata analysis was using multiple linear regressions analysis. The analysis showed that auditor's professional proficiency, and auditor tenure does not affect the audit delay.

Keywords: audit delay, auditor characteristics, professional proficiency, auditor tenure, govermen

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu : relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Agar sebuah laporan keuangan relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu. Laporan keuangan dikatakan tepat waktu jika laporan tersebut menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (*Kieso et al, 2012*).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatanwaktuan (*timeliness*) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebelum laporan keuangan pemerintah daerah diterbitkan, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajarannya. Undang-Undang No. 15 tahun 2006 menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya institusi yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan (*unaudited*) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat **3 (tiga) bulan** setelah tahun anggaran berakhir, sementara dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyampaikan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya **2 (dua) bulan** setelah Laporan Keuangan (*unaudited*) diterima. Ketepatanwaktuan laporan keuangan tergantung pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit selesai dilaksanakan (Johnson, 1998). Oleh karena itu, auditor diharapkan untuk melakukan jasa *assurance* tanpa penundaan (*delay*).

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh karakteristik auditor (penugasan berulang, dan kecakapan profesional) terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Yadiel Lase dan Sutaryo dengan judul “*pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah*” yang menggunakan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebagai populasinya, sedangkan dalam penelitian kali ini populasinya lebih difokuskan pada Provinsi Jawa Tengah dengan harapan hasil yang didapatkan lebih akurat dalam menginstrepetasikan keadaan sesungguhnya di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Isu penelitian ini berfokus pada pertanyaan

apakah karakteristik auditor (latar, penugasan berulang, dan kecakapan profesional) berpengaruh terhadap *audit delay* yang terjadi di Pemerintah?

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, berdasarkan kriteria:

- a. pemerintah daerah menyusun LKPD Tahun 2016 dan telah diaudit oleh BPK;
- b. data karakteristik auditornya dapat diperoleh.

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara, dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Tengah yang ada di Semarang.

2.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{AUDTIME} = \beta_0 + \beta_1 \text{TENR} + \beta_2 \text{PROF} + \beta_3 \text{UP} + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan persamaan regresi berganda :

AUDTIME	: <i>audit delay</i>
TENR	: penugasan berulang auditor
PROF	: kecakapan profesional auditor
UP	: ukuran pemerintah
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \dots, \beta_9$: koefisien regresi
ε	: tingkat kesalahan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didesain untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh penugasan berulang auditor, kecakapan profesional auditor, dan ukuran pemerintah terhadap *audit delay*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dengan horizon waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah total Kabupatendan Kota Provinsi Jawa Tengah	35
Tahun Penelitian	4
Jumlah total Kabupaten dan Kota selama periode 2013-2016	140
Kriteria:	
1. Pemerintah daerah yang tidak menyusun LKPD Tahun 2012-2014 dan telah di audit oleh BPK.	(0)
2. Data karakteristik auditornya tidak dapat diperoleh.	(0)
Data Outlier	(9)
Jumlah Kabupatendan Kota yang menjadi Sampel selama periode 2013-2016	131

Sumber: Data diolah penulis, 2019.

Sampel penelitian diperoleh sebanyak 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga selama empat tahun penelitian jumlah sampel 140, selanjutnya untuk menguji hipotesis dengan regresi linear berganda ternyata ditemukan 9 data *outliers*. Berdasarkan Ghazali (2011:41) data yang dikategorikan sebagai *outliers* adalah data yang mempunyai skor *unstandardized* atau yang biasa disebut *Z-score* yang memiliki nilai rata-rata kurang dari atau sama dengan -2 atau lebih dari atau sama dengan 2, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 131.

3.1 Analisis Data

3.1.1 Statistik Deskriptif

Data statistic deskriptif penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. StatistikDeskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
<i>Audit delay</i>	131	87	153	127.52	17.528
Penugasan berulang auditor	131	0	1	0.55	0.499
Kecakapan profesional auditor	131	0	1	0.53	0.501
Ukuran Pemerintah	131	28.11	30.99	28.7598	0.51793

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel *audit delay* memiliki nilai rata-rata sebesar 127,52, nilai maksimum sebesar 153, nilai minimum sebesar 87 dan nilai standar deviasi sebesar 17,528. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata waktu penyampaian laporan audit tidak mengalami keterlambatan. Variabel penugasan berulang auditor memiliki nilai rata-rata sebesar 0,55, nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0 dan nilai standar deviasi sebesar 0,499. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata penugasan berulang auditor sering terjadi. Variabel kecakapan profesional auditor memiliki nilai rata-rata sebesar 0,53 nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0 dan nilai standar deviasi sebesar 0,501. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata kecakapan profesional auditor tergolong sedang. Variabel ukuran pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 28,7598, nilai maksimum sebesar 30,99, nilai minimum sebesar 28,11 dan nilai standar deviasi sebesar 0,51793. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, sebagian besar ukuran pemerintah kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah memiliki aset yang setara.

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *KolmogorovSmirnov*.

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Kolmogorov – Smirnov</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	1,102	0,176	Data terdistribusi Normal

Sumber : Data diolah, 2019

Dari hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa tabel 3 nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan pada model regresi dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Penugasan berulang auditor	0,975	1,026	Bebas Multikolinieritas
Kecakapan profesional auditor	0,971	1,030	Bebas Multikolinieritas
Ukuran Pemerintah	0,990	1,010	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel independen, masing-masing memiliki nilai VIF berada < 10 , demikian juga hasil nilai *tolerance* $> 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Rank Spearman* dapat ditunjukan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>p-value</i>	<i>sig</i>	Keterangan
Penugasan berulang auditor	0,730	0,05	Bebas Heteroskedestisitas
Kecakapan profesional auditor	0,707	0,05	Bebas Heteroskedestisitas
Ukuran Pemerintah	0,915	0,05	Bebas Heteroskedestisitas

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 5 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan *p-value* lebih besardari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model persamaan regresi tersebut bebas dari masalahh eteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Salah satu pendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melihat nilai *Durbin Watson* (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Uji <i>Durbin-Watson</i>	
Batas Atas	2
DW	0,829
Batas Bawah	-2
Keterangan	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam table 6 tersebut terlihat bahwa nilai DW terletak antara -2 dan 2 ($-2 < 0,829 < 2$), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak terjadi autokorelasi.

3.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	t _{tabel}	p-value	Keterangan
Konstanta	48,059	0,575	1,978	0,567	
Penugasan berulang auditor	6,764	2,226	1,978	0,028	Signifikan
Kecakapan profesional auditor	6,987	2,303	1,978	0,023	Signifikan
Ukuran Pemerintah	2,506	0,862	1,978	0,391	Tidak signifikan
R ²	= 0,072	F _{hitung}	= 3,267		
Adjusted R ²	= 0,050	Sig	= 0,024		

Sumber: Data diolah, 2019

$$AD = 48,059 + 6,764TNR + 6,987PROF + 2,509UP + \varepsilon \quad (2)$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 48,059. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel penugasan berulang auditor, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah bernilai konstan atau sama dengan nol, maka kemungkinan terjadinya audit *delay* akan semakin tinggi.
- 2) Besarnya nilai koefisien variabel penugasan berulang auditor sebesar 6,764 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan penugasan berulang auditor maka audit *delay* akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitupula sebaliknya apabila terjadi penurunan penugasan berulang auditor maka audit *delay* akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 3) Besarnya nilai koefisien variabel kecakapan profesional auditor sebesar 6,987 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kecakapan profesional auditor maka audit *delay* akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitupula sebaliknya apabila terjadi penurunan kecakapan profesional auditor maka audit *delay* akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- 4) Besarnya nilai koefisien variabel ukuran pemerintah sebesar 2,506 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan ukuran pemerintah maka audit *delay* akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan ukuran pemerintah maka audit *delay* akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan.

3.3 Uji Ketepatan Model (*Goodness of fit*)

3.3.1 Uji F

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, yang dapat dilihat pada table IV.7 dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,267 > 2,171$ dan nilai signifikansi = $0,024 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan model regresi yang *goodness of fit*. Hasil tersebut juga menjelaskan bahwa, variable penugasan berulang auditor, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah secara keseluruhan berpengaruh terhadap *audit delay*.

3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted- R^2* sebesar 0,050. Hal ini berarti bahwa 5% variasi variable *audit delay* dapat dijelaskan oleh variable penugasan berulang auditor, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah. Sedangkan sisanya yaitu 95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 8. Hasil uji Hipotesis

Variabel		t_{hitung}	t_{tabel}	p - <i>value</i>	Keterangan
Penugasan auditor	berulang	2,226	1,978	0,028	H_1 diterima
Kecakapan profesional auditor		2,303	1,978	0,023	H_2 diterima
Ukuran Pemerintah		0,862	1,978	0,391	H_3 ditolak

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa :

- a. Nilai t hitung untuk variabel penugasan berulang auditor sebesar 2,226 > 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,028 < 5%, sehingga **H₁diterima**, yang artinya penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.
- b. Nilai t hitung untuk variabel kecakapan profesional auditor sebesar 2,303 > 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,023 < 5%, sehingga **H₂diterima** artinya kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.
- c. Nilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah sebesar 0,862 < 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,391 < 5%, sehingga **H₃ditolak**, yang artinya ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Penugasan Berulang Auditor Berpengaruh Terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai t hitung untuk variabel penugasan berulang auditor sebesar 2,226 > 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,028 < 5%, sehingga **H₁diterima**, yang artinya penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pemeriksa yang melakukan audit berulang (*tenure* yang panjang) di pemerintah daerah yang sama diharapkan semakin berpengalaman untuk menghadapi kondisi pemeriksaan yang sama sehingga mampu mengerjakan tugas pemeriksaan lebih baik dan lebih cepat dibanding auditor yang tidak berulang, sehingga penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yadiel Lased dan Sutaryo (2014) Kartika (2009) menunjukkan bahwa interaksi antara kecakapan profesional auditor dan penugasan berulang auditor dan interaksi antara kecakapan profesional auditor dengan latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi *audit delay*.

3.4.2 Kecakapan Profesional Auditor Berpengaruh Terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai t hitung untuk variabel kecakapan profesional auditor sebesar 2,303 > 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,023 < 5%, sehingga **H₂diterima** artinya kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sertifikasi profesional tersebut adalah bentuk pengakuan atas keprofesionalan seseorang akuntan terhadap bidang yang digelutinya yang diberikan oleh lembaga profesional pada bidang tersebut. Seseorang yang memiliki gelar sertifikasi profesi dalam bidang audit diharapkan memiliki kecakapan yang lebih baik. Kecakapan audit yang lebih baik tersebut memungkinkan audit dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Schelker (2010) dalam penelitiannya mengenai hubungan keahlian auditor dengan kinerja keuangan negara bagian di Amerika Serikat. Ia menemukan bahwa negara bagian yang mempersyaratkan auditornya harus memiliki setidaknya tidaknya sertifikasi CPA. Hasil penelitian lain yang juga sejalan adalah penelitian Hendryadi (2012) yang menyatakan bahwa kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

3.4.3 Ukuran Pemerintah Tidak Berpengaruh Terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah sebesar $0,862 < 1,978$ dan nilai signifikan sebesar $0,391 < 5\%$, sehingga **H_3 ditolak**, yang artinya ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, semua PEMDA diawasi oleh BPK, atas dasar itu, pemerintah daerah dengan aset besar, sedang maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu, sehingga ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2009) dan Siregar (2015) dalam penelitiannya yang berhubungan dengan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel penugasan berulang auditor sebesar $2,226 > 1,978$ dan nilai signifikan sebesar $0,028 < 5\%$, sehingga **H₁diterima**.
- b. Kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel kecakapan profesional auditor sebesar $2,303 > 1,978$ dan nilai signifikan sebesar $0,023 < 5\%$, sehingga **H₂diterima**.
- c. Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah sebesar $0,862 < 1,978$ dan nilai signifikan sebesar $0,391 < 5\%$, sehingga **H₃ditolak**.

4.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Sampel yang digunakan hanya sebatas pemerintah daerah di Jawa Tengah dari tahun 2013-2016, sehingga hasil penelitian belum bisa tergeneralisasi.
- b. Penelitian ini terbatas pada empat tiga yang digunakan, yaitu penugasan berulang, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah dalam mempengaruhi audit delay. Sehingga belum ada kontribusi lain yang dapat menambahi faktor yang mempengaruhi audit *delay* selain tiga variabel tersebut.

4.3 Saran

- a. Untuk penelitian berikutnya disarankan peneliti memperluas jumlah sampel, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir.
- b. Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama disarankan untuk menambah variabel yang dapat mempengaruhi audit *delay* selain yang sudah dijelaskan oleh peneliti terdahulu, supaya hasil penelitian memiliki kontribusi lebih dalam mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi audit *delay*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M. B. 1994. Agency theory and the internal audit. *Managerial Auditing Journal*, 9(8): 8-12.
- Arifa, A.N. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit delay*.
- Carcello, J., R. Hermanson, dan N. McGrath. 1992. Audit quality attributes: The perceptions of audit partners, preparers, and financial statements users. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*: 1-15.
- Cohen, S. Dan S. Laventis. 2012. “*effects of municipal, auditing and political factors on audit delay*”. *Accounting Forum*, 37:40-53
- Fachrurozi, L. 2014. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay* pada pemerintah daerah Indonesia.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah : Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1):53-64.
- Hardini, Ziza Gita dan Sukirman. “Analisis Determinan Audit Delay pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*, AAJ 5 (1) (2016).
- Istniawan, Abdul Munief dan Sri Suranta. “*Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia*”. *Snema-2015*, Padang, Indonesia.
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Kep-346/BI/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- _____ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- _____ Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____ PP No. 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____ PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- _____ UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2012. *Intermediate Accounting*, 14e. New Jersey: John Wiley dan Sons.
- Lase, Yadiel dan Sutaryo. “*PENGARUH KARAKTERISTIK AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*”. *Sna 17 Mataram, Lombok*, 24-27 Sept 2014.

- Muladi, A. 2014. Faktor-faktor yang mmepengaruhi *Audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
- Payne, J. L, dan K. L. Jensen. 2002. “*An examination of municipal audit delay*”. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21:1-29.
- Puspitasari, E., dan Sari, A.N. 2012. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit (*Audit delay*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Rahmawati, S. 2008. “Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap *Audit*”
- Rustiarini, N.W., dan N.W.M. Sugiarti. 2013. Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, *Audit Tenure*, Pergantian Auditor pada *Audit Delay*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 2 (2): 657-675.
- Schedler, Andreas. 1999. “*Conceptualizing Accountability*”, dalam *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, :13-28.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business*, 6e. WestSussex: John Wiley& Sons.
- Siregar, Baldric, “*PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN TERHADAP AUDIT DELAY LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*”. *JRAK Vol. 11*, no 2 Agustus 2015.
- Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas, R.R. 2011. “Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Kabupaten/Kota Indonesia)”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1):30-42.
- Suryanto. 2009. *Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. STIA Lembaga Administrasi Negara.
- Tyasaroja, D.H. 2015. Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit (*Audit delay*).
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: